

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEDAN INDONESIA

Pada Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Program Studi S-1



Nama : Vandel Perjindrognan Kristian Zai

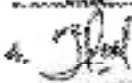
NPM : 20230006

Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Program Studi S-1  
1) Pada Hari Jumat, 05 April 2024 Dinyatakan LULUS.

1. Ketua : Dra. L. Primawati Degodona, MSP
2. Sekretaris : Vera A. Panatita, S.Sos., MSP
3. Penguji Utama : Dra. Nanda E. T. Sihombing, M.Si
4. Anggota Penguji : Jonan Rajagukguk, S.Sos., SE., MAP
5. Pembimbing Utama : Drs. Maringan Panjaitan, M.Si

1.   
2.   
3. 

4. 

5. 

Diketahui

Dekan

  
Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dewasa ini menjadi salah satu dari sekian banyak negara berkembang. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahun sehingga kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. Hal ini ditandai dengan berbagai kelemahan dan ketidakmampuan masyarakat miskin dalam menghadapi kemajuan di era globalisasi saat ini. Kemiskinan akan berdampak pada tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 26,16 juta orang, atau 9,54 persen, pada bulan Maret 2022, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Ini adalah penurunan dari 0,34 juta orang pada bulan September 2021 dan 1,38 juta pada bulan Maret 2021.

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dirasakan oleh semua negara terbelakang dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan yang multi dimensi dan merupakan masalah klasik ini telah ada sejak lama dan tidak pernah hilang dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam tabel 1 berikut disajikan presentase penduduk miskin menurut kabupaten atau kota di Kepulauan Nias dan secara khusus di Nias Barat dalam beberapa kurun waktu tahun terakhir.

**Tabel 1. 1**  
Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias  
(2020-2022)

<b>Kabupaten Kota</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)</b>
---------------------------	---

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nias	16.60	16.82	16.00
Nias Selatan	16.74	16.92	16.48
Nias Utara	25.07	25.66	23.40
Nias Barat	25.69	26.42	24.75
Gunungsitoli	16.41	16.45	14.81

*Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (diolah 2020-2023)*

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nias Barat merupakan kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni mencapai 24,75% dari total penduduk. Diikuti Kabupaten Nias Utara dengan angka kemiskinan 23,40%. Artinya, 1 dari 3 penduduk di kedua kabupaten tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian sebanyak 16,48% penduduk di Kabupaten Nias Selatan di bawah garis kemiskinan. Sementara persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias sebesar 16,00%. Berikutnya, angka penduduk miskin juga banyak berada di Kota Gunungsitoli mencapai 14.81%.

Nias Barat adalah salah satu kabupaten di bagian barat Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Nias Barat didirikan pada tanggal 26 November 2008 melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008. Sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, Kabupaten ini kemudian diresmikan pada 26 Mei 2009 oleh Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri Indonesia. Pada tahun 2020, populasi kabupaten ini berjumlah 89.994 jiwa, dengan kepadatan penduduk 173 jiwa/km<sup>2</sup>, menurut data dari Badan Pusat Statistik Nias Barat tahun 2021. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama di daerah pedesaan dan desa-desa terpencil, Nias Barat menghadapi banyak tantangan.

Desa Gunung Baru merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Nias Barat. Desa ini terletak di Kecamatan Moro'o. Mayoritas penduduk Desa Gunung Baru adalah petani, wirawasta atau pekerja informal. Desa ini memiliki tingkat pendidikan dan kesejahteraan

yang relatif rendah, dan masih ada masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Gunung Baru khususnya masalah fakir miskin, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Nias Barat. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. Data yang diperoleh pada tahun 2023, jumlah penduduk penerima PKH di Desa Gunung Baru sebanyak 114 keluarga yang tersebar diberbagai dusun. Pemerintah mengklaim program Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. PERPRES No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah undang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan PKH di Indonesia. Pada tahun 2018 ini Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa: Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu bentuk manajemen sosial, PKH telah menjadi salah satu program bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer/CBT) yang terkenal di dunia untuk mengatasi kemiskinan kronis. Menurut Buku Kerja Fasilitator PKH (2008), tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat miskin. Saat ini, fokus PKH terletak pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal

ini dikarenakan keduanya dianggap sebagai komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk memastikan bahwa Program Keluarga Harapan benar-benar membantu rumah tangga yang sangat membutuhkannya (RTSM), harus dilakukan secara profesional untuk memastikan bahwa tujuan program benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah serangkaian atau kumpulan manfaat yang dihasilkan dari penelitian, baik untuk kepentingan pengembangan program maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Peneliti

- a) Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah dipelajari selama dalam perkuliahan serta memperoleh wawasan baru melalui proses dan tahap penelitian.
- b) Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi program pemerintah dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat.
- c) Dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi, dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi yang berbeda untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- d) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi untuk menanamkan minat, motivasi, dan sikap mahasiswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya.

1) Bagi Universitas

Mengembangkan materi pengajaran dan meningkatkan reputasi universitas sebagai institusi yang mendukung riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat.

2) Bagi Institusi Pemerintah

Membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian sosial yang lebih cerdas dan efisien dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan manfaat dari program-program pemerintah yang ada. Ini dapat membantu meningkatkan kinerja program pelaksana melalui rekomendasi kebijakan, program, dan kelompok masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Dalam (Anggara, 2014:33) Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku.

Menurut David Easton dalam (Anggara, 2016:35) "*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*" (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai

secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Sementara itu, dalam (Dwijowijoto, 2003:51-52) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dari sini kita bisa meletakkan "kebijakan publik" sebagai "manajemen pencapaian tujuan nasional". Jadi, untuk sementara dapat kita simpulkan bahwa:

- 1) kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah "hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional"
- 2) kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

### **2.1.2 Analisis Kebijakan Publik**

Analisis kebijakan publik merupakan kajian yang tidak tertutup pada kajian di sektor publik saja, karena sektor privat pun pada banyak hal memanfaatkan metode-metode analisis kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan analisis kebijakan lebih lazim dikenal pada sektor publik, yaitu:

- 1) Sektor publik secara nyata memiliki tingkat kompleksitas yang lebih ketimbang sektor privat. Artinya, sektor publik yang terdiri banyak aktor dan kepentingan membutuhkan metode yang lebih lengkap untuk menyelesaikan masalah yang di hadapinya.
- 2) Sektor publik memiliki resiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak dapat diprediksi. Artinya aktor publik lebih memiliki untuk mendapatkan masalah-masalah baru dari kondisi yang tidak dapat di prediksi sebelumnya. Kejadian seperti ini lebih dimiliki oleh sektor publik ketimbang sektor privat.
- 3) Sektor publik memiliki ruang masalah yang lebih luas ketimbang sektor privat. Artinya, pemerintah membutuhkan pertimbangan yang lebih memiliki cakupan luas, dan



pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks ketimbang analisis kebijakan yang dimiliki oleh sektor privat.

Analisis kebijakan mungkin masih amat jarang disebut sebagai sebuah profesi dinegeri ini. Sebutan analisis kebijakan memang baik jika itu menyebutkan sebuah keahlian yang disandang oleh seseorang. Tetapi, jika maksudnya membangun imej analisis kebijakan adalah sebuah profesi yang harus dihargai dengan uang, maka nampaknya itu telah bertentangan dengan etika dari analisis kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan menginginkan agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kliennya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. (Melati Putri, 2021:13-15).

## **2.2 Implementasi**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi**

Kamus Webster, secara lexicografis merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. (Solichin Abdul Wahab 2012:135). Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional dapat merupakan contoh dari apa yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau konsekuensi.

Sehubungan dengan kebijakan, pengertian implementasi berarti bahwa kebijakan hanya dirumuskan dan dibuat dalam bentuk yang baik, seperti undang-undang, dan kemudian didiamkan. Namun, kebijakan harus dilaksanakan atau dilaksanakan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang paling menantang adalah pelaksanaan kebijakan, karena di sini masalah yang kadang-kadang tidak terlihat dalam konsep muncul dalam kehidupan nyata. Selain itu, konsistensi implementasi merupakan ancaman utama.

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli tentang definisi implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Solichin Abdul Wahab 2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Selain itu, (Tachjan 2006:26) Implementasi dapat disebut sebagai *“policy delivery system”*. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu

sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai implementasi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang direncanakan dengan cermat dan matang serta dilaksanakan dengan serius yang mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

### **2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut George Edwards III dalam (Chazali H. Situmorang, 2016:217) terdapat empat elemen penting dalam implementasi kebijakan yang terdiri dari komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi. Kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti.

- 2) Sumber-sumber, perintah-perintah implementasi kemungkinan diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.
- 3) Kecenderungan-kecenderungan, Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.
- 4) Struktur birokrasi, mencakup dua komponen penting: mekanisme dan struktur implementasi. Jika struktur birokrasi tidak berfungsi dengan baik, maka sumber daya menjadi tidak efektif dan kebijakan menjadi terhambat.

Dengan demikian, penulis menemukan bahwa komponen yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dapat dimulai dengan komunikasi yang kuat antara tujuan dan sasaran kebijakan, yang kemudian dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Selain itu, memenuhi sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Untuk mendapatkan hasil implementasi yang lebih berkualitas sesuai dengan struktur birokrasi yang telah ditetapkan, disposisi para implementor juga harus diperhatikan.

## **2.3 Kemiskinan**

### **2.3.1 Pengertian kemiskinan**

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya

kemiskinan menggambarkan kondisi ketidak adaan atau tidak dapat terpenuhi ketubuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan dan sandang. Kemiskinan juga berdampak pada masalah sosial seperti kriminalitas, [pengangguran](#), dan penyimpangan sosial lainnya.

Definisi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam beberapa jenis kemiskinan. Dalam (Suryawati, 2005), kemiskinan dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- 1) Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selain itu, kemiskinan juga diartikan sebagai salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradapan, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus

ditanggulangi. Strategi penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat, supaya kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi tepat sasaran. (Yacoub, 2012)

Oleh karena itu, definisi kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tanggamengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.

### **2.3.2 Indikator Kemiskinan**

Menurut (Harniati, 2010) dalam penelitian (Melati Putri, 2021:33-35) salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahalnya biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.

3. Keterbatasan akses pendidikan. Indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahalny biaya pendidikan, terbatasnya fasilitas pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan. Indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap asset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi. Indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih. Indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
7. Keterbatasan akses terhadap tanah. Indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan strategi untuk penguasaan tanah.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini sangat terkait dengan penghasilan yang bersumber dari sumberdaya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
10. Keterbatasan akses untuk partisipasi. Indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.

11. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.

Indikator-indikator kemiskinan diatas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

### **2.3.3 Program Pengentasan Kemiskinan**

Dalam (Daeli 2019:13) Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, atau suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Program pengentasan kemiskinan ini merupakan, program yang berada dibawah naungan Kementerian Sosial dalam upaya untuk menekan atau mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

- a) Penurunan beban pengeluaran masyarakat. Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu: a) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako; b) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler; c) Pemberian Bantuan



Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; dan d) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

- b) Peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: a) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana; b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan; c) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan; d) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan; dan e) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.
- c) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan b) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Adapun salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Kementerian Sosial adalah:

### **2.3.4 Program Keluarga Harapan (PKH)**

#### **2.3.4.1 Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)**

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan

bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa program keluarga harapan, juga dikenal sebagai PKH, adalah program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga atau masyarakat dengan ekonomi kelas bawah. Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dan terus dilaksanakan hingga saat ini. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, Program Keluarga Harapan adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah tujuan utama Program Keluarga Harapan. Ketika kita berbicara tentang implementasi, kita juga harus berbicara tentang seberapa efektif program bantuan sosial dan masalah apa yang terjadi agar kita dapat membuat kebijakan yang mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima. (Syahrial et al., 2022). Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

#### A. Sasaran Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Target sasaran penerima bantuan minimal memenuhi salah satu komponen, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1**  
Kriteria Komponen Penerima PKH

Komponen	Kriteria
<b>Kesehatan</b>	1. Ibu hamil atau menyusui; dan
	2. Anak Balita
<b>Pendidikan</b>	1. Anak SD/Sederajat
	2. Anak SMP/ Sederajat
	3. Anak SMA/ sederajat
	4. Anak berumur 6- 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
<b>Kesejahteraan sosial</b>	1. Lansia
	2. Penyandang disabilitas berat

*Sumber: Kemensos 2019*

B. Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan

Berikut besaran bantuan yang di distribusikan, dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 2. 2**  
Besaran Bantuan Program PKH

NO	Kategori	Total / Tahun
1	Ibu menyusui/ hamil	Rp. 3.000.000
2	Balita 0-6 Tahun	Rp. 3.000.000
3	Anak SD/sederajat	RP. 900.000
4	Anak SMP/sederajat	RP. 1.500.000
5	Anak SMA/sederajat	Rp. 2.000.000
6	penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000

*Sumber: Kemensos 2019*

C. Efektivitas Program Keluarga Harapan

Efektivitas program PKH diartikan sebagai alat bantu untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan program PKH dalam memberikan kontribusi bagi keluarga miskin.

Efektivitas program PKH dapat diukur dengan empat indikator, yaitu:

- 1) Tepat Sasaran: Program harus mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Tepat Jumlah: Dana harus sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin;
- 3) Tepat Waktu: Dana PKH dikirim langsung ke rekening penerima program PKH dalam tiga bulan, dan keluarga penerima dapat mengambilnya di ATM.

#### **2.3.4.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pencapaian tujuannya untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- b) Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan nifas, serta gizi anak balita; dan
- c) Meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, terutama untuk anak-anak KPM.

#### **2.4 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin. (Kusumawati, 2019). Kesejahteraan disebut juga sebagai kualitas kepuasan hidup yang diukur berdasarkan posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup, yang mencakup (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan

bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, dan (d) keamanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan juga merupakan ukuran kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan nilai-nilai kehidupan terwujud. Istilah "kesehatan sosial keluarga" digunakan untuk keluarga yang dapat menghasilkan anak-anak dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Kesejahteraan sosial adalah sistem tunjangan dan layanan yang membantu orang untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan mungkin memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kurangnya kemampuan dapat berarti tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang mengarah ke tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya; itu juga membantu peneliti menemukan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya dan menemukan perbandingan. Dalam bidang ini, peneliti mencantumkan berbagai temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian membuat ringkasan dari temuan tersebut, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Teori-teori atau temuan dari penelitian sebelumnya adalah dasar yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Peneliti percaya bahwa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini harus menjadi bagian khusus dari data tersebut. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

**Tabel 2. 3**  
Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Nama dan</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
-----------	-----------------	--------------	---------------	-------------------------

	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Penelitian</b>	
1	Siti Nurmawati dan Badruddin Nasir (2023)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Pada Peserta PKH di Desa Sumber Sari, Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara)	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sumber Sari berhasil meningkatkan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan keluarga peserta. Namun, pengaruh program terhadap kondisi perumahan dan ekonomi belum cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.
2	Fadila Mawadda, Addiarrahman, Fauzan Ramli (2023)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Desa Mendalo Indah melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukan data kesistem informasi Manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir verifikasi komitmen.
3	Herlina (2019)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PKH di Kelurahan Sumber Sari Kota Tanjungbalai, ada dua jenis program PKH. Yang pertama adalah program bidang

		Kota Tanjungbalai		kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang kedua adalah program bidang pendidikan.
4	Muhsin Efendi, Hasan Basri, Subhan AB3 (2021)	Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bener Meriah	Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif Deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah melibatkan proses sosialisasi dan distribusi dana oleh pendamping. Faktor penghambat dalam implementasi PKH termasuk kurangnya pendampingan, lokasi yang sulit dijangkau, dan proses penerimaan yang memakan waktu.
5	Alman Manongga, Sofia Pangemanan, Josef Kairupan (2018)	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif setelah menyusun masalah dan mengubah tujuan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, sumber daya yang ada sudah cukup tapi perlu ditingkatkan kualitasnya, disposisi dari aparat pemerintah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan insentifnya, dan struktur birokrasi sudah cukup baik tapi masih ada kekurangan.

Dari kelima hasil penelitian yang dikaji sebelumnya persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan dengan peneliti saat ini yaitu sama-sama menggunakan metode atau jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik

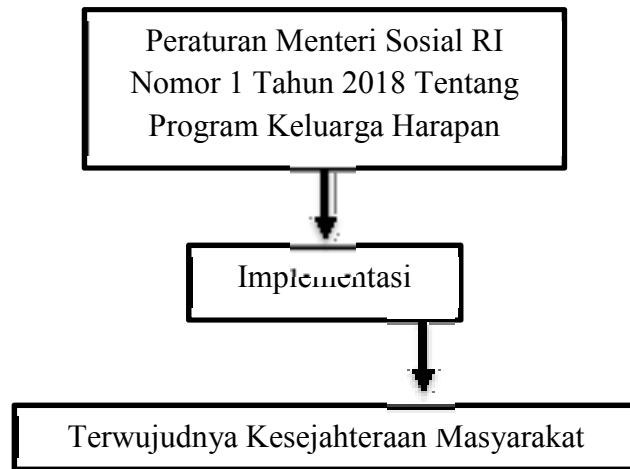
observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Perbedaan yang dikaji peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu empat diantaranya mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan dan pendidikan serta mengkaji permasalahan komunikasi pemerintah dan masyarakat yang perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan distribusi, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengkaji bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.6 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu dasar untuk berpikir yang mencakup kombinasi teori, fakta, observasi, dan penelitian pustaka. Ini akan digunakan sebagai landasan untuk menulis karya ilmiah di masa mendatang.

Kerangka berpikir ini menganalisis bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan tersebut apakah sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Artinya, Menjelaskan latar belakang penelitian, termasuk pentingnya PKH sebagai program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.





**Gambar 2.1**  
Kerangka Berpikir

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) memengaruhi dasar penelitian ini. Salah satu program pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan kepada keluarga yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Penelitian yang dilakukan di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat berfokus pada pelaksanaan PKH untuk memahami bagaimana program ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Baru. Selain itu, penelitian ini juga berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan strategi dan mekanisme yang diterapkan dalam pelaksanaan PKH terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan dapat diungkap pola-pola pelaksanaan PKH dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Baru. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

yang berharga bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut terkait pelaksanaan PKH dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **2.7 Definisi Konsep**

Pada penelitian ini, definisi konsep berarti gagasan umum yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami sesuatu dalam penelitian.

Implementasi merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau konsep dalam praktik atau kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian, implementasi sering kali merujuk pada bagaimana suatu konsep, kebijakan, atau program dijalankan atau diterapkan dalam keadaan nyata, termasuk proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, dan hasil yang dicapai. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hal ini mengacu pada peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada tahun 2018 yang mengatur tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Peraturan ini memuat ketentuan terkait tujuan, kriteria penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dana, evaluasi, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH.

PKH adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat-syarat tertentu, seperti keteraturan anak dalam pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi dalam kegiatan produktif. PKH sering kali melibatkan pemberian bantuan berupa uang tunai secara berkala kepada pesertanya.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara memadai, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan jaminan sosial. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, tingkat pendidikan, serta ketersediaan sarana dan prasarana umum yang mendukung kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara. Dalam konteks penelitian, kesejahteraan masyarakat dapat diukur dan dievaluasi dengan menggunakan berbagai indikator dan metode penelitian yang relevan.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan maksud ingin memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Desain penelitian yang digunakan yaitu fenomenologi untuk menggali dan mendapatkan informasi.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dilakukan di Desa Gunung Baru, Kecamatan Moro'o, Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan mulai dari Desember 2023 sampai dengan bulan April 2024 mendatang.

### **3.3 Informan Penelitian**

Posisi narasumber dalam penelitian kualitatif sangat penting karena peran mereka sebagai sumber data. Karena mereka berada di posisi yang sama dengan peneliti, narasumber tidak hanya dapat memberikan tanggapan pada pertanyaan peneliti, tetapi juga dapat lebih memilih cara memberikan informasinya. Di dalam penelitian kualitatif, sumber data manusia disebut informan karena posisi ini. Dalam penelitian ini, informan adalah komunitas di setiap desa yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari:

- a) Informan Kunci

Informan yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang masalah yang diangkat oleh peneliti disebut informan kunci. Pada penelitian ini, informan kunci adalah pelaksana/pendamping PKH di Desa Gunung Baru.

b) Informan Utama

Informasi utama adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sumber data atau informasi penting untuk memberikan gambaran teknis tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan utama adalah keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

c) Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang berfungsi sebagai sumber data atau informasi sekunder untuk memberikan gambaran pendukung dari data utama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan tambahan kadang-kadang memberikan informasi tambahan yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Pada penelitian ini, yang menjadi informan tambahan adalah Kepala Desa.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik analisis data adalah mengumpulkan data; tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian yaitu data Primer dan data Sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah:

a) Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat melakukan *face to face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, atau mewawancarai mereka dengan telpon atau terlibat dalam grup focus group interview. (Creswell. John W, 2016:254).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dalam metode ini, Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat seperti (diary atau buku harian, surat, e-mail). (Creswell. John W, 2016:255).

### **3.5 Teknik Analisis Data**

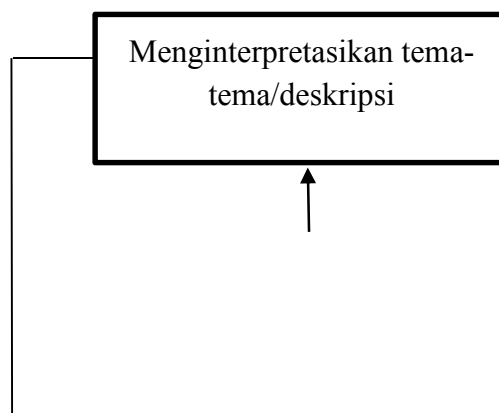
Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang

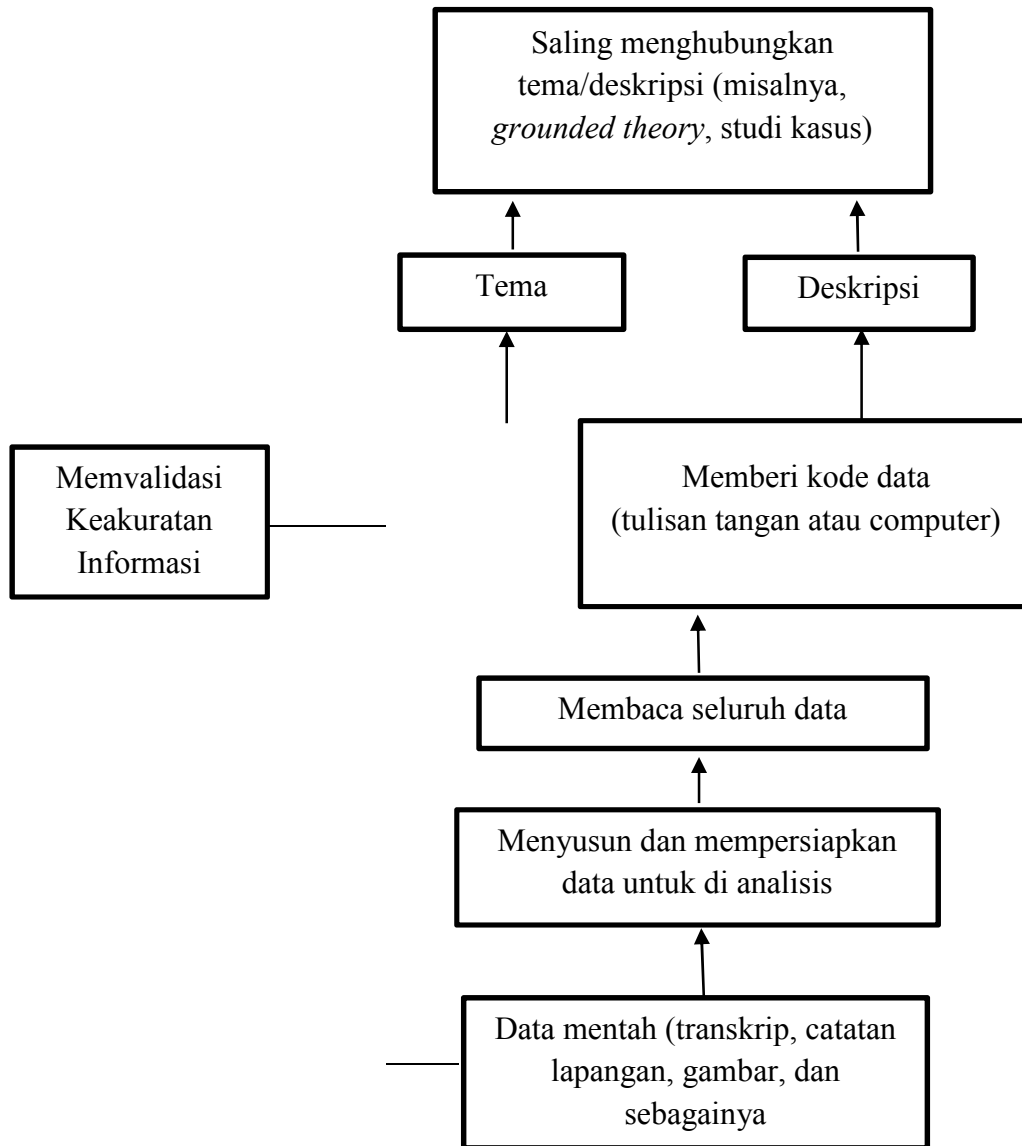
penelitian. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. (John W. Creswell, 2016)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan scanning materi, menulis data serta memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumber informasi yang didapatkan.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun generealense atas informasi yang diperoleh dan mereflesikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding data merupakan proses pengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang dianalisis
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema yang akan disajikan kembali dalam narasi kualitatif
- 6) Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi data atau memaknai data.

**Gambar 3. 1** Teknik Analisis Data





Sumber: (John W. Creswell, 2016:263)